BAB I

PENDAHULUAN

Pada bab ini akan diuraikan tentang latar belakang penelitian yang mejelaskan permasalahan yang terjadi pada objek penelitian, tujuan dari dilakukannya penelitian, manfaat dari penelitian, serta batasan-batasan dari penelitian.

1.1 Latar Belakang

Sistem Informasi (SI) dan Teknologi Informasi (TI) terus mengalami kemajuan yang sangat pesat. Hampir di semua organisasi telah mengimplementasikan SI/TI. Kehadiran SI/TI saat ini bukan hanya sebagai pendukung organisasi dalam menjalankan proses bisnisnya, tetapi sudah merupakan suatu kebutuhan. Beberapa bidang bisnis seperti perbankan dan telekomunikasi, SI/TI sudah menjadi kebutuhan dasar mereka dalam menjalankan proses bisnis. Di lingkungan instansi pemerintah, kebutuhan akan penerapan SI/TI juga dirasakan semakin penting. Hal ini terbukti dengan banyaknya peluang dan nilai tambah yang diperoleh khususnya berkaitan dengan peningkatan mutu proses kerja pelayanan kepada masyarakat.

Penerapan SI/TI di lingkunagn instansi pemerintah atau yang sering kita kenal dengan *e-Government (Electronic Government)* merupakan hasil Instruksi Presiden No.3 Tahun 2003 tentang Kebijakan dan Strategis Nasional Pengembangan *e-Government.* Adapun kebijakan yang dibuat berisi tentang :

a) Pengembangan sistem pelayanan yang handal dan terpercaya serta terjangkau masyarakat luas.
b) Penataan sistem manajemen dan proses kerja pemerintah Pusat dan Daerah secara holistik.
c) Pemanfaatan teknologi informasi secara optimal.
d) Peningkatan peran serta dunia usaha dan pengembangan industri telekomunikasi dan teknologi informasi.
e) Pengembangan sumber daya manusia di pemerintahan dan peningkatan *e-literacy* masyarakat.
f) Pelaksanaan pengembangan secara sistematik melalui tahapan yang realistik dan terukur.

Untuk melengkapi kebijakan mengenai *e-Government* yang telah dikeluarkan pada tahun 2003, pada tahun 2006 pemerintah mengeluarkan kebijakan yang berhubungan dengan pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) yang secara tidak langsung memperkuat kebijakan dalam pengembangan *e-Government*. Kebijakan tersebut adalah pembentukan Dewan Teknologi Informasi dan Komunikasi Nasional (Detiknas). Dewan yang dibentuk oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono melalui Keppres No. 20/2006, 11 November, diberi amanah untuk merumuskan kebijakan umum dan arahan strategis pembangunan nasional melalui pendayagunaan TIK. Selain itu Dewan juga diminta untuk melakukan pengkajian dalam menetapkan langkah-langkah penyelesaian permasalahan strategis yang timbul dalam rangka pengembangan TIK dengan melakukan koodinasi dengan instansi pemerintah pusat/daerah, BUMN/BUMD, dunia usaha

dan lembaga professional dalam rangka pengembangan TIK. (Majalah e-Indonesia, 2007).

Tujuan dari pengembangan *e-Government* yaitu untuk mengembangkan penyelenggaraan kepemerintahan yang berbasis elektronik dalam rangka meningkatkan kualitas layanan publik secara efektif dan efisien. Untuk melaksanakan tujuan tersebut pengembangan *e-Government* diarahkan untuk mencapai beberapa hal yaitu :

a) Pembentukan jaringan informasi dan transaksi pelayanan publik yang memiliki kualitas dan lingkup yang dapat memuaskan masyarakat luas serta dapat terjangkau di seluruh wilayah Indonesia pada setiap saat tidak dibatasi oleh sekat waktu dan dengan biaya yang terjangkau oleh masyarakat.
b) Pembentukan hubungan interaktif dengan dunia usaha untuk meningkatkan perkembangan perekonomian nasional dan memperkuat kemampuan menghadapi perubahan dan persaingan perdagangan internasional.
c) Pembentukan mekanisme dan saluran komunikasi dengan lembaga-lembaga Negara serta penyediaan fasilitas dialog publik bagi masyarakat agar dapat berpartisipasi dalam perumusan kebijakan Negara.
d) Pembentukan sistem manajemen dan proses kerja yang transparan dan efisien serta memperlancar transaksi dan layanan antar lembaga pemerintah dan pemerintah daerah otonom.

Balai Pusat Data dan Informasi Sumber Daya Air yang disingkat Balai PUSDATIN SDA merupakan Unit Pelaksana Teknis Dinas. Balai Pusat Data dan Informasi dibentuk berdasarkan Peraturan Gubernur Nomor 59 Tahun 2014

Tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas dan Badan di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Barat dengan tugas pokok melaksanakan sebagian fungsi Dinas di bidang data dan informasi sumber daya air. Dalam menyelenggarakan tugas pokok, Balai PUSDATIN SDA mempunyai fungsi dalam penyelenggaraan pengkajian bahan petunjuk teknis pengolahan data sistem informasi sumber daya air dan penyelenggaraan pengolahan data dan sistem informasi sumber daya air.

Dalam menjalankan kegiatan operasionalnya, Balai PUSDATIN SDA sudah menerapkan beberapa SI/TI. SI yang telah diterapkan yaitu Sistem Informasi Pengelolaan Data Hidrologi (PHU) yang berfungsi sebagai program pengelolaan data Hidrologi yang berguna sebagai salah satu data dasar dalam menganalisis hidrologi aliran permukaan. Program Curah Hujan, yang berfungsi sebagai pengelolaan data curah hujan yang berguna untuk merencanakan studi dan desain infrastruktur sumber daya air dan atau sebagai pertimbangan dalam menentukan sarana pengelolaan sumber daya air. Sistem Informasi Dinas PSDA Provinsi Jawa Barat yang merupakan SI Profil Dinas Provinsi Jawa Barat. *Website Intranet* PSDA yang merupakan situs yang hanya digunakan didalam lingkungan internal Dinas dan yang berfungsi sebagai bank data Sumber Daya Air.

Namun yang menjadi permasalahannya yaitu ada beberapa sistem informasi tidak difungsikan dengan baik, antaralain SI Profil Dinas Provinsi Jawa Barat dan *Website Intranet* PSDA. Berdasarkan hasil observasi yang dilakukan oleh penulis, diperoleh informasi bahwa :

a) Sistem Informasi Profil Dinas Provinsi Jawa Barat tidak berfungsi dikarenakan belum dilakukan pembaharuan terhadap sistem informasi tersebut, baik dari segi konten maupun informasi yang disediakan.
b) *Website Intranet* PSDA yang diperuntukan untuk bidang dan balai pada Dinas PSDA agar dapat menyimpan data-data pengelolaan sumber daya air sehingga dapat mempermudah masing-masing pihak dalam memperoleh data dan informasi yang dibutuhkan untuk kepentingan tugas dan kerja tidak difungsikan. Sehingga untuk memperoleh data, masing-masing bidang dan balai menggunakan sistem surat elektronik. Namun jika data yang diperlukan memiliki kapasitas penyimpanan yang besar, maka unit yang membutuhkan data harus mengambil data pada unit yang memiliki data tersebut. Hal ini sangat tidak efisien, mengingat letak balai-balai PSDA yang berada pada kabupaten/kota, sehingga membutuhkan waktu yang lama untuk memperoleh data.

Kondisi seperti ini sangat jelas terlihat kerugian yang dialami, mengingat untuk menerapkan sistem informasi tersebut dibutuhkan biaya. Selain mengakibatkan kerugian, kondisi ini juga mengakibatkan proses dalam memperoleh data dan informasi menjadi lebih lama. Selain ketidakfungsian sistem informasi yang sudah diterapkan, hal lain yang menjadi perhatian penulis yaitu tentang ketersediaan data dan ketersediaan sumber daya manusia pengelola data dan informasi. Balai PUSDATIN SDA yang merupakan Balai Pusat Data dan Informasi Sumber Daya Air, namun data yang dimiliki oleh Balai belum lengkap serta SDM pengelola data dan informasi yang terbatas. Dengan melihat tugas

pokok Balai PUSDATIN SDA sebagai penyelenggara fungsi Dinas dibidang data dan informasi sumber daya air, maka perlu dilakukan pembenahan terhadap permasalahan tersebut. Selain diperlukan pembenahan terhadap sistem yang tidak difungsikan dengan baik, ketersediaan data yang belum lengkap, serta keterbatasan SDM pengelola data dan informasi, diperlukan juga pengembangan beberapa sistem informasi yang dapat membantu Balai PUSDATIN SDA dalam melaksanakan tugas pokonya. Hal ini sangat penting dalam meningkatkan kinerja Balai PUSDATIN SDA terhadap pelayanan publik.

Keberhasilan penerapan suatu sistem dan teknologi informasi perlu didukung dengan proses perencanaan strategi yang baik, agar implementasi sistem dan teknologi informasi sesuai dengan visi dan misi organisasi, mudah dikembangkan, dan dapat menyesuaikan dengan kemampuan dana yang dimiliki oleh organisasi atau instansi, karena tanpa perencanaan yang baik seringkali penerapan teknologi informasi akan terjebak menjadi penyelesaian yang tidak optimal dengan pengeluaran biaya yang tidak sesuai dengan hasil yang diharapkan. Institusi pemerintah tuagasnya adalah memberikan pelayanan yang prima. Tuntutan ini mengharuskan instasi pemerintah untuk bertindak secara profesional, maka semua tindakan yang dilakukan harus berdasar kepada perencanaan yang strategis.

Pada penilitian ini penulis menggunakan metode *Ward and Peppard* untuk merancang rencana strategis SI/TI Balai PUSDATIN SDA. Metode ini digunakan karena mempunyai alat analisis yang lengkap. Metode *Ward and Peppard* tidak hanya berfokus pada aspek SI/TI namun juga memperhatikan aspek bisnis internal dan eksternal organisasi atau instansi. Pada metode ini ada beberapa tahap proses

dalam perencanaannya dan memerlukan *tools* untuk mendukung supaya perencanaan yang dibuat benar-benar sesuai dengan kebutuhan , efektif dan efisien sehingga dapat meningkatkan kualitas pelayanan Balai PUSDATIN SDA.

Adapun *tools* yang digunakan dalam perencanaan strategis SI/TI yaitu analisis *SWOT* yang berfungsi untuk memahami organisasi atau instansi baik dari sisi internal (kekuatan dan kelemahan) maupun sisi eksternal (peluang dan ancaman). Analisis *Critical Success Factor* yang berfungsi mengidentifikasi proses yang paling kritis, serta memberikan fokus pada pencapaian tujuan. Analisis *PEST* yang berfungsi untuk menganalisis kondisi politik, ekonomi, sosial dan teknologi yang dapat memberikan dampak bagi kinerja organisasi atau instansi. Dan analisis *Mcfarlan's Strategic Grid* yang berfungsi dalam memberikan gambaran tentang kontribusi sistem informasi yang sudah atau akan diterapkan terhadap kinerja organisasi atau instansi. Hasil yang diperoleh dari analisis adalah berupa solusi SI yang dapat digunakan dalam meningkatkan kinerja pelayanan publik Balai.

1.2 Identifikasi dan Rumusan Masalah

1.2.1 Identifikasi Masalah

Untuk melakukan pembenahan penerapan SI/TI di Balai PUSDATIN SDA, diperlukan identifikasi terhadap masalah yang terjadi. Adapun permasalahan berdasarkan latar belakang yaitu :

1. Sistem informasi yang diterapkan belum dimanfaatkan secara baik.

2. Diperlukan pengembangan sistem informasi dalam mendukung tugas dan fungsi Balai PUSDATIN SDA.
3. SDM SI/TI yang tersedia masih kurang dari segi jumlah.

1.2.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang permaslahan, maka dapat dirumuskan sebagai berikut :

1. Bagaimana mengidentifikasi rencana strategis SI/TI dengan menganalisis faktor internal dan eksternal bisnis maupun faktor internal dan eksternal SI/TI.
2. Bagaimana melakukan perencanaan strategis SI/TI dengan menggunakan metode *Ward and Peppard*

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini, yaitu :

1. Melakukan analisis tentang SI/TI yang sudah diterapkan pada Balai PUSDATIN SDA.
2. Mengidentifikasi solusi SI/TI bagi Balai PUSDATIN SDA.
3. Menghasilkan *Roadmap* SI/TI bagi Balai PUSDATIN SDA

1.4 Manfaat Penelitian

Hasil yang diharapkan dari penelitian ini, yaitu :

1. Menghasilkan sebuah perencanaan strategsi SI/TI bagi Balai PUSDATIN SDA.
2. Menghasilkan *Roadmap* bagi Balai PUSDATIN SDA.
3. Menjadikan perencanaan strategi SI/TI sebagai panduan dalam pengadaan dan implementasi SI/TI.

1.5 Batasan Masalah

Adapun batasan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Perencanaan strategis sistem informasi dan teknologi informasi yang dilakukan tidak mencangkup arsitektur data.
2. Perencanaan strategi sistem informasi dan teknologi informasi yang dilakukan tidak mencangkup perhitungan biaya.
3. Tidak mencangkup pemberian tahapan implementasi dari perencanaan strategis SI/TI yang dibuat.
4. Menggunakan metode *Ward and Peppard.*
5. *Tools* yang digunakan dalam melakukan analisis yaitu analisis *CSF,* analisis *SWOT,* analisis PEST, dan *McFarlan's Strategic Grid.*

1.6 Sistematika Penulisan

Untuk memudahkan dalam memahami penelitian ini secara keseluruhan, maka ditentukan sistematika penulisan sebagai berikut :

Bab I Pendahuluan

Bab ini menjelaskan isi penelitian mengenai latar belakang, identifikasi masalah, tujuan penelitian, batasan masalah.

Bab II Tinjauan Pustaka

Bab ini membahas mengenai teori-teori yang dipakai sebagai landasan atau dasar penelitian, yang berhubungan dengan perencanaan strategi sistem informasi dan teknologi informasi pada PSDA Provinsi Jawa Barat.

Bab III Metodologi Penelitian

Bab ini berisi tentang metode penelitian yang digunakan untuk perencanaan strategi, pengumpulan data dan teknik analisis data.

Bab IV Analisa, Perancangan dan Pengembangan

Bab ini berisi tentang penjelasan dari pelaksanaan dalam penyusuanan perencanaan SI/TI.

Bab V Penutup

Bab ini berisi tentang simpulan dari keseluruhan penelitian dan saran maupun rekomendasi terhadap penelitian ini untuk perbaikan ataupun penelitian lanjut yang memiliki kesamaan dengan topik yang diangkat.